PELAKSANAAN PATROLI DALAM MENJAGA KONDUSIVITAS WILAYAH OLEH SATPOL PP KABUPATEN MANOKWARI

Rizkky Habi Mahironmeb Dowansiba
NPP. 33.1214
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: jeanmadebey@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP, M.Si.
Email: irfanuluputty@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The implementation of patrols by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) is a key instrument in enforcing Regional Regulations and maintaining public order and regional conduciveness. However, previous studies have predominantly focused on urban areas in Java and generally examined the role of Satpol PP in law enforcement, organizational performance, or public order management. Limited attention has been given to the implementation of patrols in Eastern Indonesia, particularly in Manokwari Regency, which faces distinctive geographical challenges, communication constraints, and diverse socio-cultural.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of patrols conducted by Satpol PP of Manokwari Regency in maintaining regional conduciveness, as well as to identify the factors that support and hinder patrol effectiveness.* ***Method:*** *This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and consisted of 14 participants, including Satpol PP leaders, patrol personnel, representatives from related agencies (Transportation Agency, Indonesian National Armed Forces, and National Police), community leaders, and street vendors. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through data reduction, data display, and conclusion drawing with verification.* ***Result:*** *The findings indicate that patrol implementation has been carried out systematically through planning, organizing, field execution, and evaluation stages. Patrol activities are organized using a three-team, 24-hour shift system and emphasize preventive and persuasive approaches. The visible presence of patrol officers contributes to enhancing public safety and maintaining public order. However, patrol effectiveness remains constrained by limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, challenging geographical conditions, communication blank spots in several districts, and the absence of permanent relocation sites for street vendors.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of patrols by Satpol PP of Manokwari Regency has contributed positively to maintaining regional conduciveness through preventive and persuasive measures. Nevertheless, improving patrol effectiveness requires increased budget allocation, enhancement of facilities and infrastructure, strengthened cross-sector coordination, and the provision of sustainable post-enforcement solutions, particularly for street vendors. These efforts are necessary to support the long-term maintenance of public order and regional conduciveness in Manokwari Regency.*

Keywords: *Conduciveness; Manokwari Regency; Patrol; Public Order; Satpol PP.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian mengenai pelaksanaan patroli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada wilayah perkotaan di Pulau Jawa. Sementara itu, kajian mengenai pelaksanaan patroli Satpol PP pada wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait pelaksanaan patroli dalam menjaga kondusivitas wilayah pada daerah dengan tantangan geografis, infrastruktur komunikasi, dan sosial budaya yang berbeda. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari dalam menjaga kondusivitas wilayah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling sebanyak 14 orang yang terdiri atas pimpinan Satpol PP, personel patroli, instansi terkait, tokoh masyarakat, dan pedagang kaki lima. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli Satpol PP Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan dilakukan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban. Pada tahap pengorganisasian diterapkan sistem tiga regu patroli selama 24 jam. Pada tahap pelaksanaan, patroli dilakukan secara preventif dan persuasif melalui pengawasan, pembinaan, dan penertiban. Adapun pada tahap evaluasi dilakukan pelaporan dan penilaian terhadap pelaksanaan patroli. Meskipun demikian, efektivitas patroli masih dipengaruhi oleh keterbatasan personel, sarana prasarana, kondisi geografis, dan hambatan komunikasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan patroli Satpol PP Kabupaten Manokwari dalam menjaga kondusivitas wilayah telah berjalan cukup baik melalui tahapan yang sistematis, meskipun masih menghadapi berbagai kendala operasional. Adapun saran penelitian ini yaitu perlunya peningkatan sarana prasarana, penguatan koordinasi lintas sektor, dan penambahan dukungan anggaran guna meningkatkan efektivitas patroli dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Kata kunci: Kondusivitas Wilayah; Manokwari; Patroli; Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Menurut (Labolo, 2014) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan secara wajar dan memperoleh rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang kondusif melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang mampu mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlindungan masyarakat menjadi salah satu fungsi penting yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Perlindungan masyarakat dapat didefinisikan secara luas sebagai seluruh upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat mencelakakan mereka (Eviany & Sutiyo, 2023). Upaya perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan melalui penanganan setelah

terjadinya gangguan keamanan, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif yang bertujuan mencegah munculnya berbagai potensi gangguan ketertiban di tengah masyarakat.

Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga ketertiban umum, mengawasi dan mengontrol perilaku masyarakat, serta memberikan tindakan penegakan hukum terkait dengan peraturan daerah maupun ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah pemerintah daerah (Ilham & Rahman, 2023). Keberadaan Satpol PP menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap berbagai ketentuan yang berlaku serta menjaga stabilitas sosial di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan tugas Satpol PP dilakukan melalui berbagai kegiatan operasional, salah satunya adalah patroli. Patroli merupakan bentuk tindakan preventif yang bertujuan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kondisi wilayah, mendeteksi potensi gangguan ketertiban umum, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kehadiran aparat pemerintah di lapangan. Kehadiran petugas patroli secara rutin diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah maupun gangguan ketenteraman masyarakat sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Pentingnya patroli sebagai instrumen pencegahan juga dibuktikan oleh berbagai penelitian internasional. (Braga et al., 2019a) menemukan bahwa patroli yang difokuskan pada lokasi-lokasi rawan (*hot spots policing*) mampu menurunkan tingkat kejahatan dan gangguan keamanan secara signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran aparat secara konsisten pada wilayah tertentu memiliki pengaruh positif terhadap terciptanya rasa aman dan stabilitas sosial masyarakat. Selain itu, hasil kajian sistematis (Braga et al., 2019b) juga menunjukkan bahwa patroli yang terencana dan berbasis pemetaan wilayah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menimbulkan perpindahan gangguan ke wilayah lain.

Keberhasilan pelaksanaan patroli tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel yang diturunkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola komunikasi dan koordinasi. Menurut (Eviany et al., 2025), manajemen komunikasi pemerintahan menekankan pada pengelolaan komunikasi di dalam organisasi yang meliputi koordinasi, penyampaian informasi, serta pertemuan yang dilakukan secara rutin untuk menyamakan persepsi antarunit organisasi. Dalam konteks patroli Satpol PP, komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman antara pimpinan dan petugas lapangan, memperlancar koordinasi dengan instansi terkait, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, (Sherman, 2022) menjelaskan bahwa efektivitas kegiatan pengamanan dan patroli memerlukan pendekatan *evidence-based policing*, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi, data, dan kondisi empiris lapangan sehingga tindakan yang dilakukan aparat menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan keamanan maupun ketertiban.

Penelitian mengenai pelaksanaan patroli Satpol PP telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada wilayah perkotaan di Pulau Jawa yang memiliki karakteristik infrastruktur, aksesibilitas, dan kepadatan penduduk yang relatif berbeda dengan wilayah Indonesia Timur. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa patroli memiliki peran penting dalam meningkatkan rasa aman masyarakat, memperkuat pengawasan wilayah, serta mengurangi pelanggaran ketertiban umum. Akan tetapi, kajian mengenai pelaksanaan patroli pada wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Barat, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik geografis, sosial, budaya, dan kondisi aksesibilitas wilayah di kawasan tersebut memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih kontekstual sesuai karakteristik wilayah setempat.

Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik di wilayah Papua Barat. Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Manokwari menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kondisi geografis yang terdiri atas kawasan pesisir, perbukitan, dan pegunungan menyebabkan tidak seluruh wilayah dapat dijangkau dengan mudah oleh aparat penegak ketertiban. Selain itu, keterbatasan akses komunikasi pada beberapa distrik turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli dan koordinasi lapangan.

Tantangan tersebut semakin kompleks mengingat dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. (Labolo, 2016) menyatakan bahwa tindakan yang memicu kericuhan sering kali didorong oleh faktor ekonomi dan kondisi penduduk yang heterogen. Kabupaten Manokwari sebagai daerah tujuan migrasi memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya, agama, dan pekerjaan. Heterogenitas tersebut merupakan kekayaan sosial yang harus dikelola dengan baik, namun pada saat yang sama juga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk gangguan ketertiban apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang memadai. (Kelling & Wilson, 1982) melalui teori *Broken Windows* menjelaskan bahwa gangguan ketertiban yang dibiarkan tanpa penanganan sejak dini dapat berkembang menjadi permasalahan sosial yang lebih besar dan berdampak terhadap menurunnya rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Dalam kondisi demikian, pelaksanaan patroli oleh Satpol PP menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kondisi wilayah yang kondusif. Patroli tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui patroli yang dilaksanakan secara terencana, terorganisasi, dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mendeteksi berbagai potensi gangguan sejak dini serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, penelitian (Morrell et al., 2019) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparat sangat dipengaruhi oleh kehadiran aparat di lapangan (*presence*), perlakuan yang adil (*fairness*), dan tingkat kepercayaan publik (*trust*). Dengan demikian, patroli yang dilakukan secara konsisten tidak hanya berkontribusi terhadap penegakan ketertiban umum, tetapi juga mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan patroli Satpol PP Kabupaten Manokwari dalam menjaga kondusivitas wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pelaksanaan patroli dilakukan, bagaimana kontribusinya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Manokwari.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam menjalankan tugas tersebut, patroli menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah. Secara ideal, pelaksanaan patroli harus mampu menjangkau seluruh wilayah, dilaksanakan secara berkelanjutan, didukung sumber daya yang memadai, serta menghasilkan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Namun demikian, kondisi yang ditemukan di Kabupaten Manokwari menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual di lapangan. Meskipun kegiatan patroli telah dilaksanakan secara rutin, masih ditemukan berbagai pelanggaran ketertiban umum dan tantangan

operasional yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Luas wilayah yang harus dijangkau, kondisi geografis yang terdiri atas kawasan pesisir dan pegunungan, keterbatasan sarana dan prasarana patroli, serta hambatan komunikasi pada beberapa distrik menjadi faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan patroli.

Selain itu, Kabupaten Manokwari memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan daerah lain karena berperan sebagai pusat pemerintahan dan gerbang utama Provinsi Papua Barat. Kondisi tersebut menyebabkan dinamika sosial masyarakat menjadi lebih kompleks sehingga menuntut adanya strategi patroli yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik wilayah setempat. Di sisi lain, kebutuhan akan terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif terus meningkat seiring dengan perkembangan aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara harapan terhadap pelaksanaan patroli sebagai instrumen penjaga ketertiban umum dengan realitas pelaksanaan di lapangan yang masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian mengenai pelaksanaan patroli Satpol PP Kabupaten Manokwari dalam menjaga kondusivitas wilayah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan patroli, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kontribusinya terhadap terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan patroli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Manokwari dalam menjaga kondusivitas wilayah penting untuk dilakukan mengingat patroli merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kabupaten Manokwari sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat memiliki karakteristik wilayah yang kompleks, baik dari aspek geografis, sosial, maupun budaya, sehingga pelaksanaan patroli memerlukan strategi yang tepat agar mampu menjangkau seluruh wilayah dan menjawab berbagai potensi gangguan ketertiban yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan gambaran empiris mengenai bagaimana pelaksanaan patroli dilaksanakan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kontribusinya dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Secara keilmuan, penelitian ini penting karena dapat memperkaya kajian mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli oleh Satpol PP pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dengan daerah perkotaan yang selama ini lebih banyak menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pelaksanaan patroli sebagai instrumen preventif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Satpol PP Kabupaten Manokwari dalam mengevaluasi pelaksanaan patroli yang telah dilakukan serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas patroli di masa mendatang. Temuan penelitian dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan pola patroli yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan Satpol PP akan memiliki keterbatasan informasi empiris mengenai kondisi aktual pelaksanaan patroli di lapangan beserta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Akibatnya, upaya perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas patroli berpotensi tidak tepat sasaran karena tidak didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan yang nyata. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat optimalisasi

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta mengurangi efektivitas peran Satpol PP dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Manokwari secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, implementasi kebijakan daerah, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai Satpol PP memiliki variasi fokus, metode, teori, maupun karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadanita & Nurrahman, 2022) mengkaji penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada pelaksanaan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi deteksi dini, patroli, pembinaan, pengamanan, pengawalan, dan penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya organisasi.

(Suhendi, 2019) meneliti peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan implementasi standar operasional prosedur (SOP) ketenteraman dan ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap SOP, kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarunit pelaksana. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada penerapan prosedur operasional dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.

Penelitian (Gunawan, 2012) mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi Aceh menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kelembagaan pemerintahan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dan dukungan organisasi menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya, penelitian (Mulyana & Arsyilaa, 2022) membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan pada aspek sumber daya, komunikasi, dan kepatuhan masyarakat, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan aturan secara berkelanjutan.

Sementara itu, (Damara, 2020) meneliti implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada implementasi kebijakan penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, komunikasi dengan masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, implementasi kebijakan daerah, peran kelembagaan Satpol PP, serta penegakan peraturan daerah. Dari sisi teori, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, fungsi organisasi, kelembagaan pemerintahan, dan standar operasional prosedur. Dari sisi objek penelitian, sebagian besar penelitian dilakukan pada wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dengan karakteristik geografis yang relatif berbeda dengan wilayah Papua Barat.

Adapun penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini secara khusus berfokus pada pelaksanaan patroli sebagai salah satu fungsi operasional utama Satpol PP dalam menjaga kondusivitas wilayah, bukan hanya pada implementasi kebijakan atau fungsi ketertiban umum secara umum. Kedua, penelitian ini menggunakan perspektif pelaksanaan patroli yang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ketiga, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang memiliki karakteristik geografis berupa wilayah pesisir dan pegunungan, keterbatasan akses komunikasi, serta kondisi sosial budaya yang heterogen. Karakteristik tersebut menjadikan penelitian ini memiliki konteks empiris yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai pelaksanaan patroli Satpol PP pada wilayah dengan karakteristik khusus serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian, karakteristik objek penelitian, serta konteks wilayah penelitian yang digunakan. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, implementasi kebijakan daerah, peran kelembagaan Satpol PP, serta penegakan Peraturan Daerah secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada pelaksanaan patroli sebagai salah satu fungsi operasional utama Satpol PP dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang memiliki karakteristik geografis, aksesibilitas wilayah, serta kondisi sosial masyarakat yang berbeda dengan Kabupaten Manokwari. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang memiliki karakteristik wilayah berupa kawasan pesisir dan pegunungan, keterbatasan akses komunikasi pada beberapa distrik, serta kondisi masyarakat yang heterogen. Karakteristik tersebut memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan patroli dan belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Dari aspek kajian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran Satpol PP atau implementasi kebijakan ketertiban umum, tetapi juga menganalisis secara komprehensif pelaksanaan patroli mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai patroli sebagai instrumen preventif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan perbedaan tersebut, kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) penelitian ini terletak pada kajian mengenai pelaksanaan patroli Satpol PP dalam menjaga kondusivitas wilayah pada daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang khas di wilayah Indonesia Timur, khususnya Kabupaten Manokwari. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang tata pamong, ketenteraman dan ketertiban umum, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan patroli Satpol PP.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari dalam menjaga kondusivitas wilayah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan patroli dalam menjaga kondusivitas wilayah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Manokwari. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai proses pelaksanaan patroli, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Tipe deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan patroli tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan patroli Satpol PP. Informan terdiri atas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan patroli. Selain itu, informan lainnya meliputi pejabat struktural Satpol PP, personel regu patroli, perwakilan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tokoh masyarakat, serta pedagang kaki lima yang berinteraksi langsung dengan kegiatan patroli. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang utuh dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak pelaksanaan patroli.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Satpol PP, instansi terkait, dan masyarakat, serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan member check kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya. Transferabilitas dilakukan dengan menyajikan deskripsi penelitian secara rinci, sedangkan dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui pencatatan seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar-temuan. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipercaya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari serta beberapa lokasi patroli yang menjadi wilayah operasional Satpol PP Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025, yang meliputi kegiatan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang aktual dan komprehensif mengenai pelaksanaan patroli dalam menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Manokwari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan patroli dalam menjaga kondusivitas wilayah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari menggunakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk

melihat bagaimana patroli dilaksanakan sebagai instrumen preventif dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Manokwari. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Perencanaan Patroli

Pada aspek perencanaan, penulis mengukur pelaksanaan patroli melalui penyusunan jadwal patroli, pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban umum, serta kesiapan personel dan sarana prasarana.

Tabel 1.
Perencanaan Kegiatan Patroli Satpol PP Kabupaten Manokwari.

No	Aspek Perencanaan	Temuan Lapangan
1	Penyusunan jadwal patroli	Dilaksanakan setiap hari dengan sistem shift
2	Penentuan wilayah sasaran	Berdasarkan tingkat kerawanan gangguan trantibum
3	Persiapan personel	Personel dibagi dalam tiga regu patroli
4	Persiapan sarana	Menggunakan kendaraan patroli dan alat komunikasi
5	Koordinasi awal	Dilakukan sebelum keberangkatan patroli

Sumber: Hasil olahan penulis, 2025.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa perencanaan patroli telah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan jadwal, penentuan wilayah sasaran, serta pembagian personel. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Manokwari yang menyatakan: “Sebelum patroli dilaksanakan kami selalu menyusun jadwal dan menentukan lokasi yang menjadi prioritas pengawasan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil evaluasi patroli sebelumnya."

Hasil observasi penulis juga menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan patroli selalu dilakukan apel kesiapan dan pengarahan kepada personel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan patroli telah berjalan cukup baik karena seluruh kegiatan diawali dengan persiapan yang jelas dan terstruktur.

3.2. Pengorganisasian Patroli

Pengorganisasian patroli dilakukan untuk memastikan seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Tabel 2.
Pembagian Regu Patroli Satpol PP Kabupaten Manokwari.

Regu	Waktu Bertugas	Jumlah Personel
Regu I	Pagi	8 Orang
Regu II	Sore	8 Orang
Regu III	Malam	8 Orang

Sumber: Satpol PP Kabupaten Manokwari, 2025.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Manokwari menerapkan sistem tiga regu patroli selama 24 jam. Sistem tersebut bertujuan agar pengawasan wilayah dapat dilakukan secara berkesinambungan. Menurut salah seorang komandan regu patrol: “Pembagian regu dilakukan agar pengawasan tetap berjalan selama dua puluh empat jam dan personel tidak mengalami kelelahan yang berlebihan."

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa struktur komando dan pembagian tugas telah berjalan dengan baik, meskipun jumlah personel yang tersedia masih terbatas dibandingkan luas wilayah pengawasan.

3.3. Pelaksanaan Patroli

Pelaksanaan patroli merupakan tahap utama dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tabel 3.
Kegiatan Patroli Satpol PP Kabupaten Manokwari Tahun 2024.

Kegiatan	Jumlah
Patroli rutin	345 kali
Pelanggaran ditemukan	128 kasus
Teguran lisan	79 kasus
Teguran tertulis	32 kasus
Penertiban langsung	17 kasus

Sumber: Satpol PP Kabupaten Manokwari, 2024.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa patroli dilaksanakan secara aktif dengan frekuensi yang cukup tinggi. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa kehadiran petugas patroli memberikan rasa aman dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Salah seorang tokoh masyarakat menyatakan: "Keberadaan petugas patroli cukup membantu karena masyarakat merasa lebih aman dan gangguan ketertiban dapat segera ditangani."

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan patroli lebih banyak menggunakan pendekatan preventif dan persuasif dibandingkan tindakan represif. Pendekatan tersebut dinilai efektif dalam membangun hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat.

3.4. Evaluasi Patroli

Evaluasi patroli merupakan tahapan yang dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan patroli serta mengidentifikasi berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki pada kegiatan berikutnya. Melalui evaluasi, Satpol PP Kabupaten Manokwari dapat mengetahui tingkat keberhasilan patroli dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Tabel 4.
Bentuk Evaluasi Pelaksanaan Patroli Satpol PP Kabupaten Manokwari.

No	Bentuk Evaluasi	Pelaksanaan
1	Laporan hasil patrol	Dilaksanakan setelah patroli
2	Rapat evaluasi internal	Dilaksanakan secara berkala
3	Identifikasi pelanggaran berulang	Dilaksanakan
4	Penentuan wilayah prioritas patroli	Dilaksanakan
5	Koordinasi tindak lanjut dengan instansi terkait	Dilaksanakan

Sumber: Hasil olahan penulis, 2025.

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa evaluasi patroli dilakukan melalui penyusunan laporan kegiatan, rapat evaluasi internal, identifikasi lokasi rawan pelanggaran, serta koordinasi dengan instansi terkait. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi pelaksanaan patroli berikutnya sehingga kegiatan patroli dapat berjalan lebih efektif.

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa setiap kegiatan patroli wajib dilaporkan oleh komandan regu sebagai bahan evaluasi organisasi: "Setiap selesai patroli kami membuat laporan kegiatan yang kemudian dibahas dalam evaluasi. Dari laporan tersebut dapat diketahui lokasi yang masih sering terjadi pelanggaran sehingga menjadi prioritas patroli berikutnya."

Hal serupa disampaikan oleh salah satu personel patroli yang menyatakan bahwa hasil evaluasi sering digunakan untuk memperbaiki pola patroli dan meningkatkan koordinasi antarregu: "Evaluasi dilakukan agar patroli berikutnya lebih efektif, terutama dalam menentukan titik rawan dan pembagian personel."

Berdasarkan hasil observasi penulis, evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama patroli, seperti keterbatasan kendaraan operasional, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta hambatan komunikasi pada beberapa distrik. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menyusun kebutuhan sarana prasarana maupun strategi pelaksanaan patroli ke depan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi patroli telah dilaksanakan secara rutin dan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan patroli Satpol PP Kabupaten Manokwari dalam menjaga kondusivitas wilayah.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan patroli oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan patroli dilaksanakan secara rutin dengan pendekatan preventif dan persuasif untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kehadiran personel Satpol PP di lapangan berfungsi sebagai bentuk pengawasan langsung (*visible presence*) yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan ketertiban umum sehingga berkontribusi terhadap terciptanya kondusivitas wilayah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmadanita dan Nurrahman (2022) yang menemukan bahwa fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dilaksanakan melalui kegiatan deteksi dini, patroli, pembinaan, pengamanan, pengawalan, dan penertiban. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa patroli merupakan instrumen penting dalam upaya preventif untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan tidak hanya berfungsi melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisasi sejak dini.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Suhendi (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum dipengaruhi oleh penerapan standar operasional prosedur, koordinasi organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan patroli di Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas yang jelas melalui sistem tiga regu patroli selama 24 jam. Pengorganisasian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan patroli tidak hanya ditentukan oleh keberadaan personel, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara efektif.

Selanjutnya, temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Gunawan (2012) yang menemukan bahwa kapasitas kelembagaan dan sumber daya organisasi memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam penelitian ini, pelaksanaan patroli juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Manokwari. Keberadaan personel, kendaraan operasional, serta dukungan koordinasi antarinstansi

menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan patroli sebagai instrumen penjagaan kondusivitas wilayah.

Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Mulyana dan Arsyilaa (2022) yang menyatakan bahwa pengawasan lapangan merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban umum. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa patroli menjadi sarana utama bagi Satpol PP untuk melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas masyarakat dan mendeteksi potensi gangguan ketertiban umum. Melalui patroli yang dilakukan secara rutin, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi lapangan yang lebih akurat sebagai dasar dalam mengambil langkah-langkah penanganan yang diperlukan.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Damara (2020) yang berfokus pada implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kabupaten Nunukan. Penelitian Damara lebih menitikberatkan pada aspek penegakan kebijakan dan penertiban sebagai bentuk tindakan represif terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif untuk mencegah munculnya gangguan ketertiban umum sebelum terjadi pelanggaran yang lebih besar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai fungsi patroli sebagai instrumen pencegahan dibandingkan fungsi penertiban sebagai instrumen penegakan.

Selain itu, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya karena dilakukan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang memiliki karakteristik geografis relatif lebih mudah dijangkau. Sementara itu, Kabupaten Manokwari memiliki kondisi wilayah yang terdiri atas kawasan pesisir dan pegunungan, aksesibilitas yang terbatas pada beberapa distrik, serta kondisi sosial budaya masyarakat yang heterogen. Perbedaan karakteristik wilayah tersebut menyebabkan pelaksanaan patroli memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain.

Berdasarkan hasil diskusi dengan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa patroli merupakan salah satu instrumen utama Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya mengenai pentingnya patroli sebagai bentuk pengawasan preventif, sekaligus memberikan kebaruan pada konteks wilayah Indonesia Timur, khususnya Kabupaten Manokwari, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai pelaksanaan patroli Satpol PP sebagai upaya menjaga kondusivitas wilayah pada daerah dengan kondisi geografis yang kompleks.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai pelaksanaan patroli dalam menjaga kondusivitas wilayah, penelitian ini juga menemukan beberapa temuan menarik yang memengaruhi pelaksanaan patroli oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari. Temuan tersebut muncul selama proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan.

Salah satu temuan yang menarik adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Manokwari. Keterbatasan tersebut terlihat dari jumlah personel dan sarana operasional yang belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah pengawasan yang mencakup beberapa distrik dengan kondisi geografis yang beragam. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan patroli harus dilakukan dengan pengaturan prioritas wilayah tertentu yang dianggap memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Temuan menarik lainnya adalah kondisi geografis Kabupaten Manokwari yang terdiri atas wilayah pesisir, perbukitan, dan kawasan yang relatif sulit dijangkau. Beberapa lokasi patroli memerlukan waktu tempuh yang cukup lama sehingga memengaruhi efektivitas mobilitas personel di lapangan. Selain itu, masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan komunikasi sehingga koordinasi antarpetugas tidak selalu dapat dilakukan secara optimal pada saat patroli berlangsung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi lintas sektor memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan patroli. Dalam beberapa kegiatan tertentu, Satpol PP berkolaborasi dengan Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, serta pemerintah distrik untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kolaborasi tersebut mempermudah proses pengawasan lapangan serta meningkatkan efektivitas penanganan berbagai potensi gangguan ketertiban yang ditemukan selama patroli.

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kehadiran patroli Satpol PP tergolong cukup baik. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan petugas patroli memberikan rasa aman dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Kehadiran patroli tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Temuan menarik lainnya adalah dominannya pendekatan preventif dan persuasif yang diterapkan oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari. Dalam pelaksanaan patroli, petugas lebih mengedepankan komunikasi, imbauan, dan pembinaan kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan penertiban. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran masyarakat serta meminimalkan potensi konflik yang dapat terjadi dalam proses penegakan peraturan daerah.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan patroli tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pelaksanaan patroli itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sumber daya, kondisi geografis wilayah, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari dalam menjaga kondusivitas wilayah telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis. Pelaksanaan patroli dilakukan secara rutin dengan pendekatan preventif dan persuasif sehingga mampu mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Manokwari. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa patroli merupakan instrumen penting dalam menjaga kondusivitas wilayah melalui kehadiran petugas di lapangan yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap potensi gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, pelaksanaan patroli oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari telah berkontribusi dalam mendukung terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan patroli dalam menjaga kondusivitas wilayah, disarankan agar Satpol PP Kabupaten Manokwari terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana patroli, serta mempertahankan pendekatan preventif dan persuasif dalam pelaksanaan tugas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Keterbatasan utama penelitian terletak pada aspek waktu dan biaya penelitian yang menyebabkan proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang relatif terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan peneliti belum dapat melakukan pengamatan secara lebih

mendalam terhadap seluruh aktivitas patroli yang dilaksanakan sepanjang tahun pada seluruh wilayah operasional Satpol PP Kabupaten Manokwari. Selain itu, penelitian ini hanya dilaksanakan pada satu lokus penelitian, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi pelaksanaan patroli pada wilayah tersebut dan belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah yang memiliki karakteristik berbeda. Setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, dan kapasitas kelembagaan yang beragam sehingga pelaksanaan patroli dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif informan. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih menekankan pada kedalaman informasi dan konteks pelaksanaan patroli dibandingkan pengukuran kuantitatif yang dapat digunakan untuk melakukan generalisasi secara luas. Meskipun demikian, peneliti telah berupaya meminimalkan keterbatasan tersebut melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan triangulasi sumber dan teknik guna menjaga validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi cakupan wilayah maupun fokus kajian yang hanya berfokus pada pelaksanaan patroli dalam menjaga kondusivitas wilayah oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada lokus yang berbeda, khususnya pada kabupaten atau kota lain di wilayah Indonesia Timur yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang beragam sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan patroli Satpol PP dalam menjaga kondusivitas wilayah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas patroli Satpol PP menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) sehingga dapat mengukur secara lebih objektif hubungan antara pelaksanaan patroli dengan tingkat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas kajian pada aspek pemanfaatan teknologi, sistem informasi, serta pola koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan patroli guna menjawab tantangan penyelenggaraan ketertiban umum di era digital. Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut, diharapkan dapat diperoleh temuan yang lebih mendalam dan komprehensif sehingga mampu memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang tata pamong, ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga kondusivitas wilayah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai pelaksanaan patroli dalam menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Manokwari. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berbagi pengalaman dan pandangan yang sangat berharga selama proses pengumpulan data.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada instansi terkait, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), para dosen pembimbing, penguji, serta seluruh civitas akademika yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini

dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan serta menjadi bahan masukan bagi Satpol PP Kabupaten Manokwari dalam meningkatkan pelaksanaan patroli guna menjaga kondusivitas wilayah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Braga, A. A., Turchan, B. S., Papachristos, A. V., & Hureau, D. M. (2019a). *Hot spots policing and crime reduction: an update of an ongoing systematic review and meta-analysis*. *15*, 289–311. https://doi.org/10.1007/s11292-019-09372-3

Braga, A. A., Turchan, B. S., Papachristos, A. V., & Hureau, D. M. (2019b). *Hot Spots Policing of Small Geographic Areas Effects on Crime*. https://doi.org/10.1002/cl2.1046

Damara, W. (2020). *DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Studi : Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*. *2*(September), 1–16. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244

Eviany, E., Batubara, Y. E., Rukmana, M. G., & Tefa, G. (2025). *Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1514/1/ManajemenKomunikasiPemerintahan.pdf

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo Eva perlindungan masyarakat.pdf

Gunawan. (2012). *Satpol Pp Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh Peace And Public Order Implementation By Satpol Pp And*. *4*(2), 117–126. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.117-126

Ilham, M., & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/400/231

Kelling, G. L., & Wilson, J. Q. (1982). *Broken Windows: The police and neighborhood safety*. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/

Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799

Labolo, M. (2016). *Pengantar Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24

Morrell, K., Bradford, B., & Javid, B. (2019). *What does it mean when we ask the public if they are 'confident' in policing? The trust, fairness, presence model of 'public confidence.'* *22*(2). https://doi.org/10.1177/1461355719891197

Mulyana, & Arsyilaa, R. I. D. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Mulyana1,*. *4*(1), 15–34. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2447

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). *Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bogor*. *4*, 113–127. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014

Sherman, L. W. (2022). *"Just Right" Policing: A Job for Science*. *6*, 134–139. https://doi.org/10.1007/s41887-022-00080-z

Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145